

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Kuznets dalam Jhingan (2004:57-59), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan semakin banyaknya barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi dari yg dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan ini lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu dengan cara aglomerasi yang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuncoro (2002:24), aglomerasi merupakan lokasi yang tidak berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyediaan jasa-jasa. Perbedaan kemakmuran antar wilayah dapat dijelaskan dengan adanya aktifitas aglomerasi. Faktor mobilitas, modal, dan tenaga kerja

menyebabkan aktifitas aglomerasi di suatu daerah merugikan daerah lain (Oliveira, 2004).

Kegiatan ekonomi di beberapa negara lebih banyak terkonsentrasi hanya pada suatu kawasan tertentu. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi yang hanya di suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada tingkat pertumbuhan dan disparitas pendapatan daerah yang bervariasi. Perbedaan tingkat pembangunan dapat menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang pada akhirnya ketimpangan regional antar daerah semakin besar (Kuncoro, 2004:128). Ketimpangan pembangunan paling jelas terlihat adalah ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2003:83).

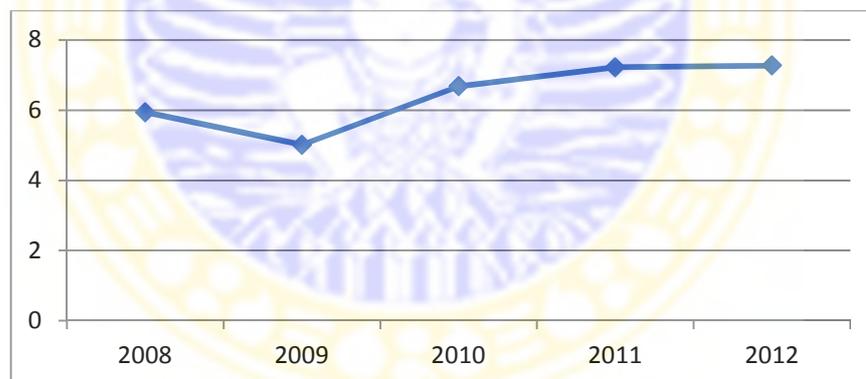
Ketimpangan pendapatan memiliki beberapa indikator dalam pengukurannya yakni: (a) Indeks Gini, (b) Indeks Theil, (c) Indeks Williamson. Indeks Williamson dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator ketimpangan. Tingkat ketimpangan diukur menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Hal tersebut didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa yang dibandingkan adalah tingkat pendapatan antar wilayah. Indeks Williamson mempunyai keunggulan dibandingkan dengan ukuran lain, karena diberi bobot dengan proporsi jumlah penduduk masing-masing daerah terhadap total penduduk (Tadjoeddin, 2003). Ketimpangan disebabkan karena adanya kekuatan sentripetal lebih besar daripada sentrifugal (Oliveira, 2004). Kekuatan sentripetal

meningkatkan aktifitas aglomerasi di beberapa daerah, sedangkan kekuatan sentrifugal menyebabkan penyebaran antar daerah.

Kekuatan sentripetal berhubungan dengan adanya pasar tenaga kerja. Konsentrasi industri di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja terampil maupun belum terampil yang akan menciptakan eksternalitas positif berupa transfer informasi atau pengetahuan. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk mengetahui kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan ketrampilan tenaga kerja. Kualitas input tenaga kerja yaitu, keterampilan, pengetahuan, dan disiplin tenaga kerja yang merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak memperkerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif (Samuelson dan Nordhaus, 2001)

Pencapaian Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pembentukan modal. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian. Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih yang diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat (Jamzani, 2007)

Menurut BPS (2012:27), kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur tahun 2012 cukup stabil, meskipun persaingan domestik maupun global sangat ketat, namun masih memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,27 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,94 persen, tahun 2009 melambat menjadi 5,01 persen, dampak dari harga minyak dunia. Tahun 2010 meningkat kembali dengan pertumbuhan sebesar 6,68 persen, bahkan pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing tumbuh sebesar 7,22 persen dan 7,27 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya dengan kegiatan investasi.



Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2008-2012 (%)

Sumber: BPS provinsi Jawa Timur 2012

Berdasarkan paparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk menganalisis tenaga kerja dan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara jumlah tenaga kerja dan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2008-2012 ?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah tenaga kerja dan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2008-2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh antara jumlah tenaga kerja dan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur secara parsial.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh antara jumlah tenaga kerja, dan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat terhadap ilmu, memberikan sumbangan ilmiah terhadap ilmu ekonomi regional
2. Untuk pemerintah, agar dapat dijadikan acuan dalam mengambil setiap kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi

3. Untuk penulis selanjutnya, penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis khususnya berkaitan dengan pengembangan penelitian serupa.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasannya, tujuan dan manfaat kegiatan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dalam penulisan ini, tunjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan diskripsi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai analisis atau penyelesaian dari data yang ada yang akan dibahas secara terperinci.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran